

EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PRA SEJAHTERA

Rina Angraini¹
Ahmad Kafrawi Mahmud²
Baso Iwang³

Email: rinaangraini@gmail.com¹, ahmad.kafrawi@uin-alauddin.ac.id², basoiwang73@gmail.com³

^{1,2,3} Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRACT

The main problem of this research is how the effectiveness and contribution of the hope family program in the welfare of poor communities in Saragian village. This study examines the effectiveness and contribution of the hope family program among the community, this study uses qualitative methods with the approach used is descriptive and naturalistic research approaches. The data sources from this study are primary data in the form of direct interview data to several informants and secondary data in the form of data obtained from outside the primary data. Then the data collection methods used were direct interviews, documentation, and recordings. Techniques for processing and analyzing data, namely using the analysis used descriptive qualitative analysis method by exploring the facts as they are with in-depth analysis techniques. The results of these studies indicate that the family hope program in Saragian Village, Alu District, Polewali Mandar, there are several stages of activities carried out, namely, targeting, regional preparation, initial meetings and validation, distribution of assistance, formation of PKH participant groups, verification of commitments, suspension etc. The effectiveness of the family hope program (PKH) in Saragian Village, Alu District hope family program is expected and needed by the community due to weak economic conditions coupled with adequate educational conditions.

Keywords: PKH, Welfare, Effectiveness, Contribution, Saragian Village

ARTICLE INFO

Received 15 Januari 2021

Accepted 31 Maret 2021

Online 5 April 2021

*Correspondence:

Ahmad Kafrawi Mahmud

E-mail: ahmad.kafrawi@uin-alauddin.ac.id

ABSTRAK

Fokus masalah penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas dan kontribusi program keluarga harapan dalam mensejahterkan masyarakat pra sejahtera di desa Saragian. Adapun fenomena dan perumusan masalah yang dibuat dalam penelitian ini, sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan dan hambatan program keluarga harapan (PKH) dalam upaya mensejahterkan masyarakat, 2) Sejauh mana efektivitas program keluarga harapan (PKH) terhadap masyarakat, 3) Sebesar apa kontribusi program keluarga harapan (PKH) terhadap masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dan naturalistik. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer berupa data wawancara langsung kepada beberapa informan dan data sekunder berupa data yang diperoleh selain data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara langsung, dokumentasi dan rekaman. Teknik pengolahan dan analisis data yakni menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan menggali fakta sebagaimana adanya dengan teknik analisis pendalaman kajian. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa program keluarga harapan di Desa Saragian Kecamatan Alu Kab. Polewali Mandar terdapat beberapa tahapan kegiatan yang dilakukan yakni, penetapan sasaran, persiapan daerah, pertemuan awal dan validasi, penyaluran bantuan, pembentukan kelompok peserta PKH, verifikasi komitmen, penangan dan lain-lain. Efektivitas program keluarga harapan (PKH) di Desa Saragian Kec. Alu program keluarga harapan diharapkan dan dibutuhkan oleh masyarakat dikarenakan kondisi ekonomi yang lemah

ditambah dengan kondisi pendidikan yang memadai. PKH dianggap efektif di dalam masyarakat Desa Saragian Kec. Alu, bantuan yang dirasakan oleh masyarakat sehingga anak-anak mereka memiliki jaminan biaya pendidikan sehingga di Desa Saragian tidak lagi banyak yang putus sekolah karena biaya. Kemudian kontribusi Program Keluarga Harapan (PKH) sumbangan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat diharapkan dapat memberikan perubahan yang signifikan terhadap masyarakat di Desa Saragian terkhusus dari aspek pendidikan dan kesehatan.

Kata Kunci: PKH, Kesejahteraan, Efektivitas, Kontribusi, Desa Saragian

Pendahuluan

Negara Indonesia yang masih berkembang seperti sekarang ini, masih dalam proses pembangunan di berbagai bidang terkhusus di bidang ekonomi. Terjadinya krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 telah mengakibatkan penurunan di berbagai aspek seperti menurunnya kualitas hidup masyarakat, keterbelakangan pendidikan, penurunan gizi dan rendahnya tingkat kesehatan (Usman, 2010).

Kemiskinan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat, diakibatkan tingginya jumlah penduduk. Berdasarkan hasil dari sensus penduduk Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 1.330.961 jiwa yang terdiri atas 667.858 jiwa penduduk laki-laki dan 663.103 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Sulawesi Barat mengalami pertumbuhan sebesar 1,87 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100,72 jiwa.

Kepadatan penduduk di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 mencapai 79 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4,5 orang. Kepadatan Penduduk di 6 Kabupaten cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kabupaten Polewali Mandar dengan kepadatan sebesar 214 jiwa/km² dan terendah di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 42 jiwa/km² (BPS, 2018). Garis kemiskinan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan bahwa Provinsi tersebut memiliki pola yang sangat baik di daerah pedesaan maupun daerah perkotaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat, jumlah dan presentasi penduduk miskin menurut Daerah di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014 sampai tahun 2018.

Tabel 1 Jumlah Penduduk dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Daerah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Sampai Tahun 2018

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)		Presentasi Penduduk Miskin (%)	
	Kota	Desa	Kota	Desa
2014	29,87	124,82	9,99	12,67
2015	22,51	130,70	8,69	12,70
2016	25,07	121,83	8,43	12,00
2017	30,02	119,45	9,50	11,70
2018	31,45	121,38	9,80	11,66

Sumber: BPS, Susenas 2018

Tabel 2 Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat

Tahun 2014-2018 (Rp/Kapita/Bulan)

Kabupaten	2014	2015	2016	2017	2018
Majene	278.045	290.568	320.726	335.248	349.522
Polewali Mandar	293.073	305.462	337.138	351.856	366.355
Mamasa	207.126	213.369	226.202	239.112	249.103
Mamuju	195.991	202.167	223.150	241.616	252.429
Pasangkayu	279.940	294.156	312.474	328.100	330.226
Mamuju Tengah	-	203.120	215.769	226.559	236.669

Sumber: BPS, Susenas 2018

Perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam suatu strategi kebijakan sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan kemudian memperkecil kesenjangan multidimensional. Dalam arti yang luas, Perlindungan sosial mencakup seluruh tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat, guna melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar, terutama kelompok miskin (Suharto, 2009).

Peranan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang dapat melakukan berbagai cara untuk memberantas kemiskinan, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan sehingga membuat masyarakat sejahtera. Kebijakan pro masyarakat miskin yang diwujudkan dalam bentuk Program Keluarga Harapan yakni upaya untuk mensejahterakan masyarakat (Prasetyia, 2012).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin sebagai imbalannya keluarga miskin tersebut diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusianya (SDM) yaitu dari segi pendidikan dan kesehatan. Program Keluarga Harapan (PKH) ini pertama kali diimplementasikan di berbagai Negara yakni Brazil, Amerika Latin dan lainnya.

Tabel 3 Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2018

No	Nama Desa	Peserta PKH Tahap I	Peserta PKH Tahap II	Jumlah
1	Kalumammang	80	110	190
2	Mombi	65	90	155
3	Pao Pao	85	114	199
4	Pupu Uring	76	100	176
5	Saragian	75	119	194
6	Sayoang	25	39	64
7	Alu	62	90	152
8	Petoosang	40	67	107
Jumlah		508	729	1.237

Sumber: BPS, Susenas 2018

Tujuan Program Keluarga Harapan yaitu meningkatkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga miskin. Meningkatkan tarif pendidikan anak-anak rumah tangga miskin, meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak di bawah 6 tahun dari rumah tangga miskin (Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, 2019). Sasaran dari Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu ibu hamil, ibu menyusui, serta memiliki anak balita dan anak usia sekolah setingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Penerima bantuan yakni ibu atau yang mengurus anak di rumah tangganya. Kemudian, pada kartu

kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) pun akan tercantum nama ibu atau wanita yang mengurus anak bukan kepala rumah tangga.

Teori Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di suatu Negara-negara yang berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan senantiasa menarik perhatian diberbagai kalangan, baik para akademisi maupun para praktisi serta berbagai teori, konsep dan pendekatan pun terus menerus dikembangkan untuk mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi. Dalam konteks masyarakat Indonesia, masalah kemiskinan juga menjadi suatu masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus-menerus (Syamsuddin, 2016).

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi standar kebutuhan hidupnya pada suatu wilayah. Kondisi keluarga yang ketidakmampuan ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan yang berupa pangan, sandang maupun papan. Pendapatan yang rendah akan berakibat pada tidak tercukupinya suatu kebutuhan dasar akan tetapi berdampak pada ketidakmampuan dalam memenuhi standar kehidupan sehari-hari seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan pada umumnya (Chriswardani, 2005).

Secara umum teori-teori yang menjelaskan mengapa kemiskinan terjadi, dapat dibedakan menjadi teori yang berbasis pada pendekatan ekonomi dan teori yang berbasis pada pendekatan sosial-antropologi, Khususnya tentang budaya yang terjadi dikalangan masyarakat. Teori yang berbasis kepada teori ekonomi antara lain melihat kemiskinan sebagai akibat dari kesenjangan kemilikan faktor produksi, kegagalan kepemilikan, serta kebijakan yang biasa, perbedaan kualitas sumber daya manusia, serta rendahnya pembentukan modal (Maipita, 2014).

Teori Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan sebuah kondisi seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan seseorang untuk melanjutkan pendidikannya dan pekerjaan yang memadai dapat menunjang suatu kualitas hidup sehingga hidupnya bebas dari kebodohan, kemiskinan. Kemudian Menurut Kollé bahwa indikator dari kesejahteraan sebagai berikut: dengan melihat kualitas hidup dari aspek materi seperti kualitas rumah, bahanpangan dan lain-lainnya; dengan melihat kualitas hidup dari aspek fisik seperti kesehatan tubuh, lingkungan, dan lain-lainnya; dengan melihat kualitas hidup dari aspek mental seperti fasilitas pendidikan, budaya, dan lain-lainnya; dan dengan melihat kualitas hidup dari aspek spiritual seperti moral, etika, dan lain- lainnya (Rosni, 2012).

Berdasarkan Pengertian kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan pasal 1 ayat (1): "kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan *material, spiritual, dan sosial* warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya.

Program Keluarga Harapan

Pemerintah Indonesia pada tahun 2007 telah melakukan program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) atau yang dikenal dengan istilah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) bukan yakni lanjutan program pemerintah Subsidi Langsung Tunai (BLT) yang sudah berlangsung yang telah dirasakan oleh masyarakat. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan untuk perlindungan sosial atau *strategi* didalam

penanggulangan masalah kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan tentang pendidikan, kesehatan dan pemenuhan pokok bagi *lansia* dan penyandang *disabilitas* berat.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara non-tunai menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial tersebut merupakan implementasi program penanggulangan masalah kemiskinan di Indonesia meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Penyaluran bantuan sosial secara non-tunai dilaksanakan terhadap bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan pemberian bantuan sosial. (Kementerian Sosial, 2018). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program lintas kementerian dan lembaganya seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan Informasi dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Data dan Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencari makna, pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung atau tidak langsung dalam *setting* yang diteliti, konsensual, dan menyeluruh. Penelitian bukan mengumpulkan data sekali jadi atau sekaligus dan kemudian mengolahnya, melainkan tahap demi tahap dan makna disimpulkan selama proses berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan, bersifat naratif dan holistik. Penelitian Kualitatif mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi atau fenomena tersebut (Yusuf, 2019).

Penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang mencari makna, pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung atau tidak langsung dalam *setting* yang diteliti, konsensual, dan menyeluruh. Penelitian bukan mengumpulkan data sekali jadi atau sekaligus dan kemudian mengolahnya, melainkan tahap demi tahap dan makna disimpulkan selama proses berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan, bersifat naratif dan holistik. Penelitian kualitatif mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi atau fenomena tersebut (Yusuf, 2019).

Data primer mendefinisikan bahwa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai (Meleoang, 2013). Sumber primer adalah segala sesuatu yang secara langsung berkaitan dengan objek material penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH)
- b. Camat Alu
- c. Kepala Desa
- d. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Data sekunder seperti buku-buku literatur, majalah, surat kabar, makalah penelitian, arsip atau dokumen dan sumber lain yang relevan digunakan sebagai pelengkap informasi dalam penelitian. Kemudian observasi dan wawancara merupakan teknik dalam mengumpulkan data penelitian ini yaitu melalui suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu

(Yusuf, 2019). Dengan demikian teknik Tringulasi merupakan metode yang digunakan dalam penelitian. Teknik Tringulasi oleh Moleong (2003) adalah teknik pemeriksaan keabsahan datayang memanfaatkan sesuatu yang lain diatur data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Desa Saragian merupakan Suatu Desa atau daerah pegunungan yang berada pada ketinggian $\pm 25M - 50M$ diatas permukaan laut yang terletak $\pm 4KM$ dari ibu kota Kecamatan, dengan jarak $\pm 65km$ dari pusat ibu kota Kabupaten, $\pm 285km$ dari pusat ibu kota Provinsi. Kawasan ini dapat ditempuh dengan waktu tempuh dua jam dari ibu kota kabupaten dan lima jam dari ibu kota Provinsi. Batas daerah Desa Saragian adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara: Desa Alu
- b. Sebelah selatan: Desa Tanganbaru Kecamatan Limboro
- c. Sebelah barat: Desa Kalumammang
- d. Sebelah timur: Desa Mombi dan Kelurahan Petoosang.

Berdasarkan jumlah penduduk desa yang ada di kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2018 adalah sebanyak 13.446 jiwa dengan masing-masing jumlah penduduk laki-laki sebanyak 6.417 jiwa dan perempuan sebanyak 7.049 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Saragian adalah 902 jiwa untuk laki-laki dan 938 jiwa untuk perempuan, dengan jumlah keseluruhan adalah sebanyak 1.820 jiwa.

**Tabel 4 Jumlah penduduk menurut Desa/Kelurahan
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018**

Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Saragian	902	938	1.820
Mombi	2.282	2.554	4.836
Petoosang	711	770	1.481
Kalumammang	1.054	1.199	2.253
Pao-pao	276	327	603
Puppuuring	326	363	689
Sayoang	435	440	875
Alu	431	458	889
Jumlah	6.417	7.049	13.446

Sumber : BPS, 2019

Kondisi ekonomi

Masyarakat di Kecamatan Alu pada dasarnya bermata pencarian sebagai petani, sumber daya alam yang dihasilkan seperti kopi, padi, kakao, cengkeh, dan rotan. Bertani adalah suatu pekerjaan pokok bagi sebagian masyarakat Kecamatan Alu, petani juga ada dua yakni petani pemilik dan petani penggarap serta sebagian masyarakat di Kecamatan Alu bergelut di berbagai bidang seperti Pedagang dan adapula di bagian pemerintahan (PNS). Adapun jenis mata pencarian masyarakat Kecamatan Alu berdasarkan penajakan terdiri dari PNS, Pegawai/ Guru honor, Pengusaha, Pedagang, Petani, Tukang Bangunan, dan Peternak.

Desa saragian terdiri dari 6 dusun yaitu dusun sosso, dusun sosso lambe, dusunrooang, dusun malimbung timur, dusun malimbung barat, dan dusun baulu. Adapun kondisi sumber daya manusia secara umum menurut latar belakang pendidikan masih sangat rendah, masih ada

yang belum mampu membaca dan menulis. Desa saragian merupakan Desa yang sebagian besar penduduknya masih bergantung pada atau dari hasil pertanian dan peternakan kambing dan sapi dan sebagian besar punya usaha sendiri. Sebagian masyarakat masih tergolong masyarakat miskin ditandai dengan kehidupan yang masih seadanya.

1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Saragian dalam mengentaskan kemiskinan yang terjadi di Desa Saragian secara terperinci terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Target penetapan sasaran calon penerima PKH

Mekanisme penetapan penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) dilihat dari data terpadu seperti yang dikatakan bapak Aco sebagai pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Saragian bahwa:

“Menerima data-data dari pusat terus dikelola oleh TNP2K (Tim Nasional Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan), kemudian dilaksanakan di Kementerian Sosial yang disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Kemudian barulah diberikan kepada kami para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk melakukan validasi data atau melakukan survey ke data-data atau nama-nama calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yg kami terima dari Kementerian Sosial. Kemudian kami melakukan pendamping atau mengadakan kegiatan berupa seminar terlebih dahulu untuk menjelaskan mengenai Program Keluarga Harapan (PKH), syarat-syarat penerima bantuan PKH, dan lainnya. Kepada masyarakat calon penerima bantuan kemudian kami lakukan pendamping juga menyurvei langsung ke masyarakat calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) data-data yang kami terima kemudian kami melihat dari segi kondisi fisik seperti rumah, dan melihat kondisi yang terjadi dan juga mewawancarai langsung calon penerima bantuan dan jugamenanyakan ke sekelilingnya (tetangga). Kemudian hasil dari validasi data yang dilakukan oleh pendamping dikirim kembali ke pusat untuk menentukan kelayakan dari peserta atau calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH)”.

Bantuan program keluarga harapan (PKH) di Desa Saragian telah membantu pihak pemerintah desa dalam mengurangi angka putus sekolah. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Kepala Desa Saragian yakni Bapak Ramli, S.Pd.I mengenai adanya bantuan serta penetapan peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), yakni sebagai berikut:

“Kami bersyukur dengan adanya program tersebut serta beliau mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah karena adanya bantuan ini angka putus sekolah di Desa Saragian sudah berkurang dan sangat membantu masyarakat di Desa Saragian dari segi kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Tapi saya harap penetapan peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) harus melalui kerja sama yang baik dari beberapa pihak untuk menyukseskan program tersebut sehingga tidak adanya salah sasaran, untuk itu kami Pemerintah Desa berkerja sama dengan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)”.

b. Penetapan lokasi calon penerima bantuan PKH

Tujuan validasi calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rangka memperoleh peserta Program Keluarga Harapan yang valid dan memenuhi kriteria sesuai syarat kepesertaan Program Keluarga harapan (PKH) (Pedoman Pelaksanaan PKH: 33).

c. Persiapan pertemuan awal dan validasi calon PKH

Validasi adalah kegiatan mencocokkan data awal hasil pendataan PPLS dengan kondisi terkini calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang valid dan memenuhi kriteria sesuai syarat kepesertaan. Dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu pendamping PKH, yakni dengan Pak Aco di Desa Saragian di Kecamatan Alu, Ia menjelaskan sebagaimana berikut:

“Intinya dalam proses persiapan awal ini mengumpulkan semua peserta PKH untuk memberi informasi mengenai kegiatan-kegiatan selama mendapatkan bantuan dari PKH. Peserta PKH itu wajib mengikuti peraturan yang telah disosialisasikan pendamping PKH sebelum kontrak penyaluran dana PKH itu diberikan kepada penerima manfaat.

d. Penyaluran bantuan dana kepada peserta PKH

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Aco berkaitan dengan mekanisme pencairan bantuan dana PKH ialah sebagai berikut:

“Pendamping PKH ketika hendak menyalurkan dana bantuan dari pemerintah ke tangan peserta, pendamping terlebih dahulu harus mengkoordinasikan dana tersebut dengan pihak Bank, setelah itu barulah diinformasikan kepada penerima manfaat agar tidak terjadi antrian dan penumpukan, kemudian proses penyaluran bantuan tersebut dilakukan secara berkelompok dan bertahap sehingga pembagian secara teratur.”

e. Pembentukan Kelompok Peserta PKH

Penerima manfaat kami buat kelompok-kelompok yang rumahnya saling berdekatan agar mempermudah dan mempercepat ketika ada kumpul-kumpul, dalam satu kelompok ada pembentukan struktur kepengurusan, yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Biasanya satu kelompok terdiri dari sepuluh sampai lima belas orang penerima manfaat. Pemilihan ketua kelompok dipilih dengan cara terbuka dan sukarelawan.

Kemudian untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di Desa Saragian Kecamatan Alu, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mengatakan bahwa:

“Masalah yang mungkin biasa muncul dalam masyarakat adalah adanya kecemburuan sosial antara masyarakat penerima bantuan dan non penerima selamajadi pendamping PKH di Desa Saragian masyarakat-masyarakat di Desa Saragian baik itu peserta PKH atau bukan itu tidak terlalu banyak protes dan masyarakat masih kental akan kerjasama (gotong royong) sehingga mengurangi konflik yang terjadimengenai proses penyaluran bantuan Program keluarga Harapan (PKH). Kemudian kami juga sebagai pendamping memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai tugas dan fungsi kami sebagai pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)”.

f. Verifikasi komitmen dengan peserta PKH

Verifikasi komitmen Peserta Keluarga Harapan (PKH) pada prinsipnya dilakukan terhadap pendaftaran dan kehadiran anak baik di sekolah untuk komponen pendidikan maupun puskesmas dan jaringannya untuk komponen kesehatan. Khusus verifikasi anggota keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) penyandang disabilitas hanya diberlakukan pemeriksaan satu kali dalam setahun.

g. Penangguhan dan pembatalan peserta PKH

- 1) Peserta harus memenuhi komitmen yang telah ditentukan untuk 1 kali siklus penyaluran bantuan (3 bulan berturut-turut) namun masih tercatat sebagai peserta PKH.
- 2) Kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) akan dikeluarkan bila peserta tidak memenuhi komitmen verifikasi yang telah ditentukan untuk dua (2) kali siklus penyaluran bantuan (6 bulan berturut-turut) melalui investigasi dalam monitoring dan evaluasi kegiatan.
- 3) Dalam tiga (3) kali siklus penyaluran bantuan berturut-turut (9 bulan) peserta tidak mengambil bantuan, maka dikeluarkan dari kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui investigasi dalam monitoring dan evaluasi kegiatan.
- 4) Keluarga sangat miskin terbukti tidak memenuhi kriteria sebagai Program Keluarga Harapan (PKH), maka dikeluarkan dari kepesertaan.
- 5) Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah dikeluarkan kepesertaannya, tidak dapat diajukan kembali sebagai peserta dan.
- 6) Penangguhan program bagi pemerintah Kabupaten atau Kota dapat terjadi apabila pemerintah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan tidak melaksanakan komitmennya yaitu menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan.

h. Pemutakhiran data peserta PKH.

Pemutakhiran data merupakan suatu perubahan sebagian atau keseluruhan data awal yang tercatat. Berikut contoh perubahan informasi dari rumah tangga, yakni:

- 1) Perubahan tempat tinggal.
- 2) Kelahiran anggota keluarga.
- 3) Penarikan anak-anak dari program (kematian, keluar atau pindah sekolah dll)
- 4) Masuknya anak-anak baru ke sekolah
- 5) Ibu hamil
- 6) Perbaikan nama atau dokumen
- 7) Perubahan nama ibu atau perempuan penerima PKH (menikah atau cerai, meninggal, pindah atau bekerja diluar domisili).
- 8) Perubahan fasilitas kesehatan yang telah di akses.
- 9) Perubahan variable sinergitas Program (PKH, 2016: 37).

Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) melakukan kerjasama dengan ketua kelompok Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memeriksa dan memberikan informasi terkait perubahan data tersebut.

i. Pengaduan peserta PKH.

Dalam hal ini pengaduan dapat berasal dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) maupun pihak luar, seperti masyarakat umum dan LSM. Pendamping sebagai petugas terdepan memiliki tugas untuk menyelesaikan permasalahan yang diadukan namun

apabila permasalahan penanganan oleh pihak yang lebih tinggi maka pendamping berkewajiban untuk memfasilitasi dengan mengadakan permasalahan menggunakan form pengaduan (formulir C-2) yang selanjutnya akan ditangani oleh UPPKH Pusat (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2016).

2. Hambatan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat di Desa Saragian Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar. Sebagaimana koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Saragian Kecamatan Alu mengatakan bahwa: “Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di Desa Saragian. Diantaranya jarak rumah masyarakat dengan bank memiliki jarak yang cukup jauh sehingga menjadi suatu hambatan tersendiri” (Koordinator PKH, 2020).

“Faktor yang menghambat pelaksanaan PKH di Desa Saragian Kecamatan Alu yaitu jarak masyarakat ke bank dan transportasi yang kurang memadai sehinggamenjadi hambatan serta perlunya usaha yang sangat maksimal dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).” (Kepala Desa, 2020).

“Nah, ini yang menghambat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), di antaranya yaitu adanya kecemburuan sosial di kalangan masyarakat” (Aco, 2020).

Penghambat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Saragian Kecamatan Alu, yaitu sebagai berikut:

- a. Pertama, Perlunya usaha yang sangat maksimal yang harus dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga mampu memaksimalkan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut.
 - b. Kedua, kondisi geografis penerima dengan letak bank atau proses pencairan bantuan penerima Program Keluarga harapan (PKH) di Desa Saragian Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar.
 - c. Ketiga, kecemburuan sosial sosial yang mengakibatkan keresahan di kalangan masyarakat di Desa Saragian Kecamatan Sendana kabupaten Polewali Mandar.
3. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Masyarakat. Hasil wawancara dengan ibu Masni selaku peserta Program Keluarga Harapan yang mengatakan bahwa:

“Beliau sangat terbantu dengan adanya Program keluarga Harapan (PKH) tersebut dikarenakan membantu perekonomian di dalam keluarga. Kemudian beliau berkata bahwa adanya bantuan ini beban pengeluaran untuk peralatan dan keperluan anak sekolah lainnya sudah tidak memberatkan lagi sehingga anak-anak saya bisa sekolah dan saya mendorong anak saya untuk lebih rajin sekolah lagi karena adanya bantuan ini (Masni, 2020).

Begitupun dengan ibu Halima sebagai peserta Program Keluarga harapan (PKH) mengatakan bahwa:

“Saya merasa terbantu dengan usia tidak mudah lagi dan suami sudah meninggal dunia setelah mendapat bantuan ini anak-anak saya bisa melanjutkan sekolahnya (Halima, 2020)”.

Dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) sangat diharapkan dan dibutuhkan oleh masyarakat dikarenakan kondisi ekonomi yang lemah di tambah dengan

kondisi pendidikan yang memadai. Program Keluarga Harapan (PKH) dianggap efektif di dalam lingkungan masyarakat Desa Saragian Kecamatan Alu, bantuan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga anak-anak mereka memiliki jaminan untuk biaya sekolah sehingga anak-anak di Desa Saragian tidak banyak lagi yang putus sekolah dikarenakan biaya.

4. Kontribusi Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap masyarakat. Adapun kontribusi Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap masyarakat di Desa Saragian, sebagai berikut:

a. Aspek Pendidikan

Berkaitan dengan pendidikan, peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikan jika memiliki anak berusia 7-15 tahun. Anak peserta PKH tersebut harus didaftarkan/terdaftar pada satuan pendidikan (SD/MI/SDLB/Salafiyah Ula/Paket A atau SMP/MTs/SMLB/Salafiyah Wustha/Paket B termasuk SMP/MTs terbuka) dan mengikuti kehadiran di kelas minimal 85 persen dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila ada anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.

b. Aspek Kesehatan

Berkaitan dengan kesehatan, RTSM yang sudah ditetapkan menjadi peserta PKH dan memiliki kartu PKH, diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan.

Kesimpulan

Pelaksanaan Pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Saragian Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar, dapat dilihat dari beberapa rangkaian tahapan kegiatan yang dilakukan yakni, penetapan sasaran, persiapan daerah, pertemuan awal dan validasi, penyaluran bantuan, pembentukan kelompok peserta PKH, verifikasi komitmen, penangguhan dan pembatalan, pemutaakhiran data, dan terakhir pengaduan. Kemudian adapun Hambatan di dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Saragian Kecamatan Alu. Pertama, Perlunya usaha yang sangat maksimal yang harus dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Kedua, jarak rumah masyarakat dengan bank memiliki jarak yang cukup jauh sehingga menjadi suatu hambatan tersendiri. Ketiga, yaitu adanya kecemburuan sosial di kalangan masyarakat.

Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Saragian Kecamatan Alu. Program Keluarga Harapan (PKH) sangat diharapkan dan dibutuhkan oleh masyarakat dikarenakan kondisi ekonomi yang lemah di tambah dengan kondisi pendidikan yang memadai. Program Keluarga Harapan (PKH) dianggap efektif di dalam lingkungan masyarakat Desa Saragian Kecamatan Alu, bantuan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga anak-anak mereka memiliki jaminan untuk biaya sekolah sehingga anak-anak di Desa Saragian tidak banyak lagi yang putus sekolah dikarenakan biaya. Kontribusi Program Keluarga Harapan (PKH) yakni sumbangan yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat serta kontribusi tersebut diharapkan dapat memberikan perubahan yang signifikan terhadap masyarakat di Desa Saragian Kecamatan Alu terutama khusus dari aspek pendidikan dan kesehatan.

Referensi

Badan Pusat Statistik. (2018) Provinsi Sulawesi Barat Dalam Rangka Sulawesi Barat Province in Figures.

Badan Pusat Statistik. (2019). Statistik Kemiskinan Sulawesi Barat 2018. CV. Prima Digi, Mamuju.

Chriswardani. (2005). Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. *Jurnal Jakarta*.

Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI. (2019). Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) 2019.

Kementerian Sosial RI. (2016). Perubahan Pertama Atas Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: 01/Ljs/02/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai.

Maipita. (2014). *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan Cetakan I*. Yogyakarta; Upp Stim Ykpn.

Moleong L. J. 2003. Metodologi Kualitatif. Bandung: PT.RemajaRosadakarya

Prasetya, Ferry. 2012. *Modul Ekonomi Publik Bagian V: Teori Pengeluaran Pemerintah*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

Suharto, Edi. (2009). Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat. Bandung: PT Refika Aditama.

Syamsuddin. (2016). *Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial Cetakan I*. Makassar: Syahadah.

Usman. (2010). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (Suatu Studi di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo). *Jurnal*.

Yusuf. (2019). *Metode Penelitian Cetakan V*. Jakarta: Prena Damedia Group.